

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pakistan adalah negeri yang penuh dengan konflik dan mendapat perhatian di dunia internasional sangat menarik untuk sebuah kajian, khususnya pengamat politik Barat atau Islam dalam percaturan politik dewasa ini. Dalam sejarahnya Pakistan memiliki akar peradaban yang sangat tinggi. Pakistan memiliki posisi negara yang strategis serta tidak ketinggalan Pakistan memiliki dampak positif dari konstilasi dunia internasional, baik dimasa lalu baik masa sekarang.

Sejak menjadi sebuah negara yang merdeka, negara ini tidak pernah padam dari konflik. Berbagai peristiwa telah terjadi di dalam negeri Pakistan dan hampir selalu menghiasi pemberitaan massa internasional. Memang sejak memerdekakan diri dari India 14 Agustus 1947, Pakistan selalu menampilkan sesuatu yang menarik untuk diberitakan di media massa, diulas dan dibahas para penganut, pengamat dan pakar, bahkan untuk dijadikan sebagai bahan diskusi masyarakat “awam” sekalipun.

Maka menjadi sebuah kewajiban bagi penulis apabila tertarik untuk memaparkan sebuah penelitian yang berkaitan tentang Pakistan, terutama sekali dalam hal bagaimana proses demokrasi berjalan di negeri tersebut. Demokrasi memang sedang menjadi suatu yang fenomenal yang mengglobal, menjadi konstruksi peradaban manusia yang tertinggi dan diuniversalkan yang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Begitu juga dengan Pakistan yang tidak terlepas dengan adanya demokratisasi yang “sistemnya” sering berubah, menyebabkan tuntutan yang bersifat substansial atau inti demokrasi itu sendiri. Ada seorang dari kalangan militer yang sangat mempengaruhi demokratisasi di Pakistan yaitu Pervez Musharraf. Rakyat Pakistan terutama para rival politik Pervez Musharraf menuntut akan adanya suatu kebangkitan sebagai suatu perubahan yang mampu mengubah sistem politik Pakistan yang dikehendaki oleh elemen masyarakat yaitu demokrasi yang sesungguhnya.

Berbicara tentang demokrasi Pakistan maka tidak bisa terlepas oleh seorang sosok Pervez Musharraf dari kalangan militer. Sebagai seorang yang tegas, politikus yang moderat tapi tidak terlalu terbuka di kepemimpinannya. Dari apa yang telah dipaparkan tersebut membuat penulis ingin mengetahui lebih banyak tentang demokrasi di Pakistan dan berbagai peristiwa yang dihadapi oleh Pervez Musharraf menjabat sebagai seorang yang sangat berpengaruh pada demokrasi Pakistan , hingga penulis memilih judul **“Dinamika Keterlibatan Militer Dalam Demokratisasi Pakistan Studi Kasus: Pemerintahan Pervez Musharraf (1999-2008).”**

B. Latar Belakang Masalah

Pakistan adalah sebuah negeri yang terkoyak, negara ini sangat meyakini sekali demokrasi akan tetapi sering sekali mengkhianati dan dikhianati oleh demokrasi. Di negara Pakistan pernah terjadi kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah dikarenakan sebagai bentuk rasa kecewa terhadap kinerja suatu pemerintahan. Akan tetapi pada saat berhasil mengkudeta pemerintahan yang sah dan menjalankan suatu roda demokrasi di negara Pakistan, kalangan militer ini menjalankan pemerintahan dengan cara otoriter yang tidak sejalan dengan apa yang dinamakan suatu negara yang demokrasi. Ada suatu fenomena yang terjadi di Pakistan dimana militer sering sekali terjun

di dunia perpolitikan Pakistan. Berikut rezim militer yang pernah menjabat sebagai Presiden di Pakistan:

1. Pakistan di bawah kekuasaan Rezim Muhammad Ayub Khan (1958-1969)

Panglima tertinggi Muhammad Ayub Khan memegang kekuasaan pemerintahan Pakistan semenjak Oktober 1958 melalui kudeta militer. Pada masa pemerintahannya, ia menetapkan Undang-Undang Darurat Militer dan membubarkan Majelis Nasional sehingga selama berlakunya UU Darurat Militer tersebut tidak terdapat Majelis Nasional. Ayub Khan membatasi pentingnya badan legislatif, partai politik dan pemilu. Ia menetapkan sistem pemerintahan yang disebut sebagai “Basic Democracy” dan menyediakan badan pemilihan untuk memilih Presiden, dan ia menolak pelaksanaan Demokrasi Parlementer serta lebih mendukung penerapan Demokrasi terpimpin yang lebih terbatas yang dipimpin oleh militer.

Ayub Khan mempunyai dua pendekatan utama pada tahun-tahun pertama kekuasaannya. Pendekatan itu yang pertama adalah konsolidasi kekuasaan dan intimidasi terhadap oposisi. Sementara pendekatan yang kedua yaitu menetapkan kerangka kerja bagi stabilitas masa depan dengan mengubah institusi ekonomi secara legal dan konstitusional. Ia juga menunjukkan bakat yang luar biasa dalam hal merencanakan suatu sistem dalam Konstitusi 1962¹ yang melindungi peran sentral Presiden dengan tetap mengakui beberapa kekuasaan dan otonomi yang dimiliki lembaga perwakilan, kabinet, dan badan peradilan. Hal yang paling menarik adalah bahwa melalui Konstitusi 1962, Ayub Khan dapat menyembunyikan sistem otoritariannya yang berlaku dari tahun 1962 hingga 1969 tanpa adanya tantangan yang berarti. Bahkan hal ini ditutupi

¹ Konstitusi 1962 tidak dihasilkan oleh dewan konstituante akan tetapi oleh Komisi Konstitusi yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Ayub Khan.

sebagai suatu langkah sementara untuk melakukan restorasi dalam kondisi yang sesuai untuk menuju sistem demokrasi secara utuh.

Selama Kurang lebih 11 tahun Ayub Khan menjabat sebagai Chief of Martial Law Administrator (CMLA) yaitu selama UU Darurat Militer diberlakukan dan kemudian sebagai Presiden yaitu setelah diberlakukannya Konstitusi Ayub pada tanggal 1 Maret 1962. Pemerintahan yang dibentuknya merupakan koalisi yang disusun atas dasar modernisasi, nasionalis berbasis perkotaan, batas tradisi, dan aristokrasi pedesaan. Ayub Khan juga sangat bergantung pada elit birokrasi, bahkan ia melibatkan para birokrat ini dalam sistem “Basic Democracy” yang menyediakan suatu jaringan kerja dalam pemerintahan dan membantu birokrasi untuk mengembangkan hubungan yang mengakar di tingkat paling rendah dalam masyarakat Pakistan.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Basic Democracy menjangkau dari desentralisasi kekuasaan yang terbatas tapi nyata dalam badan-badan di tingkat distrik sampai suatu sistem pemilihan tidak langsung bagi Presiden. Pada tahun 1960, Ayub Khan mengubah kebijakan mengenai pers dan publikasi di Pakistan, dimana rezim yang berkuasa dapat memberikan larangan terhadap peredaran surat kabar dan media massa lainnya. Rezim Ayub Khan juga memberikan kontrol ketat organisasi, serikat dagang, dan kelompok pelajar untuk menghindari adanya aktivitas politik. Mereka dibungkam oleh pemerintah melalui ancaman maupun penggunaan kekerasan karena Ayub Khan merasa khawatir terhadap aktivitas kaum oposisi yang sangat berpengaruh pada penegakkan Demokrasi.

Pertumbuhan ekonomi selama Rezim Ayub Khan berkembang pesat. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antar kelas dan diikuti dengan jatuhnya standar hidup penduduk Pakistan.

Kaum elit pemilik tanah, elit industri, elit birokrasi dan elit militer menjadi sangat kuat, akibatnya muncul tingkatan kelas dan etnik, terutama karena warga negara etnik Bengal di Pakistan timur kurang terwakili dalam kelompok elit.

Kegagalan Ayub Khan dan sistem Basic Democracy-nya agak mengejutkan bagi rakyat Pakistan. Akan tetapi terdapat beberapa perkembangan politik, ekonomi dan sosial yang terjadi di Pakistan yang mendorong Ayub Khan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan melakukan restorasi rezim militer. Pada akhir tahun 1968, Presiden Ayub Khan mengalami stroke yang cukup parah, sehingga rakyat menganggap ia akan segera meninggal dan tidak dapat menjalankan tugasnya di pemerintahan. Akibatnya banyak bermunculan aktivitas politik yang anti terhadap Basic Democracy baik di Pakistan Barat maupun Pakistan Timur.

Pada awal tahun 1969, Presiden Ayub Khan semakin kekurangan basis dukungan massa, seperti kaum elit perkotaan dan kaum Muhajir yang kurang mendukung sistem Politik 1962, sehingga mereka memprakarsai gerakan protes. Pihak militer sendiri lebih mendukung partai yang berbasis luas dan kehendak massa agar Ayub Khan mundur, sehingga akhirnya Ayub Khan mengundurkan diri.²

2. Pakistan di bawah Kekuasaan Rezim Militer Yahya Khan (1969-1971).

Rezim militer kedua yang memerintah Pakistan dipimpin oleh Agha Muhammad Yahya Khan. Pada periode rezim militer kedua ini sangat berbeda dengan rezim militer yang pertama, dimana Yahya Khan memegang kekuasaan penuh sebagai CMLA dan ia menjalankan peran yang sangat berbeda dengan Ayub Khan. Yahya Khan melaksanakan pemilihan nasional bagi

² http://en.wikipedia.org/wiki/Ayub_Khan

Majelis Konstituante yang baru dan mendesak semua kelompok politik, termasuk partai-partai di Pakistan Timur dengan permintaan atas otonomi luas untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemilihan umum. Ia juga mengumumkan bahwa pemilihan akan dilaksanakan pada akhir tahun 1970, sehingga gerakan protes baik di Pakistan Barat maupun Pakistan Timur semakin berkurang dan persiapan untuk pelaksanaan pemilihan segera dilakukan.

Sejak bulan Maret 1969 hingga bulan Desember 1971 ditetapkan UU Darurat Militer dengan menunda pelaksanaan Konstitusi 1962. Yahya Khan juga mengakhiri peran Basic Democrat sebagai badan pemilihan. Pemilu baru dilaksanakan pada bulan Desember 1970, yang melesat dari rencana semula untuk melaksanakan pemilihan bagi Majelis Nasional pada bulan Oktober di tahun yang sama, yang kemudian diikuti dengan pemilihan badan legislatif di tingkat propinsi. Pemilu ini dapat dianggap sebagai pemilu pertama di Pakistan yang dilaksanakan secara bebas, adil, dan lancar sejak negara ini merdeka. Akan tetapi, hasil pemilihan ini tidak memuaskan kaum elit baik di Pakistan Barat maupun Pakistan Timur. Hal ini disebabkan karena hasil dari pemilihan nasional yang berbasis “one man one vote” tersebut dimenangkan oleh Liga Awami di Pakistan Timur namun partai ini tidak memperoleh satu kursi pun di wilayah Pakistan Barat. Sementara hasil pemilu di Pakistan barat terutama di Punjab dan Sindh menunjukkan kemenangan mayoritas pihak PPP, sedangkan untuk wilayah NWFP (North West Frontier Province) dan Balochistan, National Awami Party menang plural. Partai-partai Islam dan Liga Muslim hanya ada sedikit di Pakistan Barat dan bahkan tidak terwakili di Pakistan Timur.

Pada awal tahun 1971 basis bagi pemerintahan yang demokratis tidak dapat berjalan dengan baik. Ketika itu terjadi pertentangan antara Bhutto dari PPP yang berada di Pakistan

Timur dengan Mujibur Rahman sebagai pemimpin Liga Awami di Pakistan Barat.³ Yahya Khan juga melakukan penundaan terhadap Majelis Nasional dalam waktu yang tidak terbatas, yang diikuti dengan pelarangan terhadap Liga Awami dan membatasi aktivitas politik serta menekankan sensor terhadap pers. Hal ini mendapatkan reaksi cepat dari masyarakat Pakistan Timur yang mulai berdemonstrasi dan melakukan kerusuhan hingga memunculkan revolusi terbuka. Bahkan kaum Bengalis tidak mau membayar pajak dan menolak pembatasan UU Darurat Militer atas pers dan sensor terhadap radio. Sejumlah peristiwa yang terjadi menimbulkan krisis 1971 yang merupakan bencana bagi pemerintahan Yahya Khan, rezim militer, dan reputasi militer sebagai pihak yang sering turut campur dan memanipulasi pembangunan politik di Pakistan. Akhirnya Yahya Khan mundur akibat kekalahan Pakistan dalam peperangan dengan India dan lahirlah negara baru di sayap timur Pakistan, yaitu Bangladesh.⁴

3. Pakistan di bawah kekuasaan Zia Ul Haq (1977-1988).

Kondisi dalam negeri Pakistan yang mengalami pergolakan atas kemenangan Zulfikar dalam pemilu bulan Maret 1977, yang dianggap rakyat Pakistan mengandung kecurangan, dimanfaatkan oleh pihak militer di bawah komando Jenderal Muhammad Zia Ul Haq untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan pihak sipil. Melalui suatu kudeta militer pada bulan Juli

³ Liga Awami dengan pemimpinnya Mujibur Rahman (Mujib) telah menetapkan basis bagi koalisi dengan beberapa partai dari sayap barat Pakistan sebelum bulan Maret 1971, dan tidak ada keraguan bahwa ini merupakan suatu basis yang memuaskan bagi hubungan jangka panjang antara kedua belah sayap. Bhutto kemudian meminta agar koalisi antara partai-partai dominan di sayap timur dan barat dapat menciptakan pembangunan yang berjangkauan luas yang tentu saja dalam segala macam sistem politik. Dalam isu ini ternyata Bhutto lah yang benar. Tetapi kemudian banyak pimpinan dari Liga Awami yang tidak terlalu tertarik terhadap sistem demokrasi dalam kerangka penggabungan kedua sayap Pakistan.

⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/Yahya_Khan

1977, Zia yang semula menjabat sebagai Chief of the Army Staff (COAS) kemudian memegang kekuasaan sebagai CMLA.

Dengan menerapkan UU Darurat Militer, Zia Ul Haq menunda konstitusi 1973. Selama berlakunya UU Darurat Militer tersebut (1977-1985), Pakistan dibagi atas beberapa zona yang masing-masing diperintah oleh deputi CMLA. Ia juga membentuk badan peradilan militer yang memiliki yuridiksi paralel terhadap mahkamah sipil di Pakistan. Baru pada bulan Maret 1985 tatanan peraturan perundangan yang terdapat dalam Konstitusi 1973 dihidupkan kembali untuk memperkuat kedudukan presiden.⁵

Zia menjanjikan pemilu 90 hari setelah ia berkuasa, namun janji itu kemudian ditundanya, bahkan hingga tahun 1985 tidak pernah dilaksanakan pemilu. Pada bulan Desember 1984 dilaksanakan referendum dengan mengajukan pertanyaan mengenai apakah rakyat Pakistan memberi dukungan terhadap Zia dan kebijaksanaannya. Hasil referendum ini menunjukkan 98% dari suara yang masuk mendukung Zia, sehingga ia terpilih sebagai presiden Pakistan.⁶

Selama berkuasa, Zia mengeluarkan kebijaksanaan yang cenderung bersifat represif, serta mempergunakan kekerasan dalam menindak segala bentuk penentangan terhadap kebijaksanaan yang ditetapkannya. Pada tahun 1979 dilakukan pelarangan terhadap partai politik sebagai manifestasi ketidaksukaannya terhadap partai politik dan keberadaan oposisi. Selanjutnya di bulan Februari 1981 PPP dilarang secara resmi sehingga bersama beberapa partai lainnya, PPP bergabung dalam Movement for the Restoration of Democracy (MRD). Amandemen UU yang

⁵ Hal tersebut diundangkan oleh Zia dalam the Revival of Constitution of 1973 Order yang mengatur mengenai:

- a. Wewenang presiden untuk memilih dan memecat Perdana Menteri, serta mengatur peran Perdana Menteri sebagai penasihat Presiden.
- b. Wewenang presiden untuk memilih dan memecat Gubernur di tingkat propinsi dan menteri federal.
- c. Wewenang Presiden untuk membubarkan Majelis Nasional dan Majelis di tingkat Propinsi.

⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Zia_ul_Haq

mengatur Partai Politik 1962 dilaksanakan pada tahun 1979 dan 1984 yang melarang pejabat di tingkat nasional dan propinsi serta menteri federal yang menjabat semasa Zulfikar berkuasa untuk berkompetisi dalam pemilu.

Antara tahun 1977-1981 Pakistan tidak mempunyai lembaga Legislatif. Baru pada tahun 1981 Zia menunjuk Majelis I-Shura (Dewan Federal) yang berfungsi sebagai penasihat CMLA. Sementara itu pemilu bagi Majelis Nasional dan Majelis di tingkat Propinsi dilaksanakan pada bulan Februari 1985 yang berbasis non-partai dimana partai tidak diizinkan untuk berkompetisi dalam pemilu ini meskipun anggotanya boleh sebagai individu. Setelah pemilu dilaksanakan, pendukung PPP diboikot dan Mohammad Khan Junejo diangkat sebagai Perdana Menteri pada bulan Maret 1985.

Peningkatan standar hidup masyarakat yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak memberikan jaminan terhadap kehidupan bidang politik yang demokratis di Pakistan. Rezim militer berkuasa telah menetapkan benteng dalam arena politik, dan birokrasi memegang kekuasaan yang tidak terkendali. Dengan demikian, pemegang kekuasaan utama pada masa Zia berkuasa adalah militer, birokrasi, para tuan tanah dan elit industri.

Pada akhir 1985, Zia mengakhiri berlakunya UU Darurat Militer. Partai politik dengan segala aktivitasnya dihidupkan kembali. Akan tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena pada bulan Mei 1988 Junejo dipecat, Majelis Nasional dan Majelis Propinsi dibubarkan. Ia berjanji akan mengadakan pemilu pada bulan November 1988, tapi janji itu tidak terwujud karena peristiwa tragis kecelakaan pesawat terbang yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1988 telah merenggut nyawa Zia.

Ada yang unik dari kepemimpinan Zia ul-Haq. Dia terus membangun Pakistan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam atau dengan kata lain pada masa pemerintahan Zia ul-Haq ini Pakistan menggunakan hukum syari'at Islam. Pernah pada suatu Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (mungkin hal ini tidak pernah dilakukan oleh pemimpin negara Islam manapun) karena Zia meminta kepada seluruh anggota Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dihadiri oleh banyak Kepala Negara untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an sebelum menyampaikan sebuah pidatonya. Pembawaan pemerintahan pada masa Zia ul-Haq memang keras dan tanpa mengenal adanya kompromi.⁷ Rezim militer ini memberlakukan Mahkamah Syari'at Islam yang melaksanakan hukum berdasarkan ketentuan Al-Qur'an.⁸

4. Pemerintahan Pervez Musharraf (1999-2008)

Pada 1997, Nawaz Sharif terpilih menjadi Perdana Menteri setelah Partai Liga Muslim Pakistan yang dipimpinya memenangkan pemilihan umum dengan mayoritas besar. Kepala Staf Angkatan Darat Jehangir Karamat mengusulkan dibentuknya Dewan Keamanan Nasional sebagai forum interaksi antara para pemimpin sipil dan para staf militer. Karamat dipecat oleh Perdana Menteri Nawaz Sharif dan menunjuk Jenderal Pervez Musharraf untuk menggantikannya.

Pervez Musharraf adalah penguasa keempat yang memasuki kawasan politik yang berasal dari kalangan militer. Pervez Musharraf meraih kekuasaan pada 12 Oktober 1999 setelah sebuah kudeta. Musharraf secara *de facto* menjadi kepala pemerintahan. Rencananya, pada tanggal 12 Oktober 1999, Nawaz Sharif akan mencopot Musharraf dan mengangkat direktur ISI (Inter

⁷Achmad Munif, *50 Tokoh Politik Legendaris Dunia*, Penerbit Narasi, Yogyakarta, 2007. Hal.138-141.

⁸ M. Iwan Gayo, *Buku Pintar Seri Senior*, Penrbit Pustaka Warga Negara, Jakarta Selatan 2007. Hal.539.

Services Intelligence) atau biasa disebut dinas intelijen rahasia Pakistan dan mengangkat Zianuddin Butt untuk menggantikan posisi Pervez Musharraf yang menjabat Kepala Staff Angkatan Darat pada saat itu. Musharraf, yang saat itu berada di luar negeri menggunakan pesawat komersial untuk kembali ke Pakistan. Sejumlah Jenderal angkatan darat senior menolak pencopotan Musharraf yang mana tindakan tersebut dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Agung.

Nawaz Sharif memerintahkan bandara Karachi ditutup untuk mencegah pendaratan pesawat yang ditumpangi Musharraf sehingga pesawat Musharraf berputar-putar di langit Karachi. Kudeta pun dimulai para Jenderal membubarkan pemerintahan Sharif dan segera mengambil alih bandara. Pesawat Musharraf mendarat dengan bahan bakar yang sudah sangat menipis. Musharraf mengambil alih pemerintahan dan Nawaz Sharif dikenakan tahanan rumah dan akhirnya memilih untuk mengasingkan diri keluar negeri. Sharif kembali ke Pakistan pada 25 November 2007.

Pervez Musharraf menjadi Presiden Pakistan pada 20 Juni 2001. Pada 6 Oktober 2007, ia terpilih kembali sebagai Presiden Pakistan untuk masa bakti ketiga. Pada 24 November 2007, the Pakistan Election Commission mengumumkan, dirinya kembali terpilih menjadi Presiden.⁹ Pervez Musharraf memiliki kekuasaan yang luas di Pakistan setelah sebuah kudeta tidak berdarah pada 12 Oktober 1999. Presiden Muhammad Rafiq Tarar yang menjabat 1 Januari 1998 harus mengakhiri jabatannya pada 20 Juni 2001. Sejak itu, selain sebagai Kepala Eksekutif, secara resmi ia mengangkat dirinya sebagai presiden. Ini terjadi hanya beberapa hari sebelum kunjungan dijadwalkan ke Agra untuk pembicaraan dengan India. Musharraf kemudian cenderung bergaya

⁹ Zaenal Ali, *Tragedi Benazir Bhutto*, Penerbit Narasi, Yogyakarta, hal. 87.

represif pada masa pemerintahannya latar belakang kepemimpinan militer itulah yang menjadi krusial di Pakistan.

Pada 12 Mei 2000, Mahkamah Agung memerintah Musharraf mengadakan pemilihan umum selambat-lambatnya 12 Oktober 2002. Untuk melegitimasi kepresidenannya dan menjamin kelanjutannya setelah pemulihan demokrasi makin mendekat, ia mengadakan referendum pada 30 April 2002. Situasi ini memungkinkan memperpanjang masa jabatan kepresidenan hingga lima tahun setelah pemilu Oktober 2002. Tetapi, referendum ini diboikot oleh kebanyakan kelompok politik, sehingga jumlah pesertanya hanya sekitar tiga puluh persen atau mungkin lebih rendah menurut perkiraan pada umumnya.

Pada 14-16 Juli 2001, Presiden Pervez Musharraf mengikuti pertemuan tingkat tinggi di kota Agra dengan Perdana Menteri India Atal Behari Vajpayee. Tujuan pertemuan ini adalah normalisasi hubungan antara dua negara, dengan memprakarsai rencana resolusi atas persoalan Kashmir. Berkenaan dengan kunjungannya itu, Presiden Musharraf menyatakan dalam berbagai kesempatan bahwa ia menunjukkan pendekatannya yang fleksibel. Di samping itu, ia mengungkapkan keinginannya untuk dikenal sebagai pemimpin Pakistan yang “membuat sejarah” (dengan) memecahkan krisis panjang, yaitu Kashmir.

Pada 12 Januari 2002, Musharraf memberikan pidato penting yang menentang ekstrimisme berdasarkan agama. Musharraf secara tegas mengecam semua tindakan terorisme, termasuk semua yang dilakukan atas nama upaya pembebasan mayoritas rakyat Kashmir yang beragama Islam dari kekuasaan India. Ia pun berjanji untuk melawan segala bentuk ekstrimisme dan perbuatan melawan hukum di dalam negeri Pakistan sendiri.

Sejak keterlibatannya sebagai perwira senior pasukan khusus Pakistan pada invasi Uni Soviet ke Afganistan, ia telah membangun hubungan pribadi yang sangat baik dengan sejumlah seksi dari lembaga keamanan Amerika Serikat. Setelah kudeta pada 1999, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton menghubunginya untuk mengungkapkan keprihatinannya mengenai kudeta itu dan ingin Asia Selatan yang stabil. Setelah serangan teroris pada 11 September 2001 di Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell dan para pejabat pemerintahan lain bertemu dengan Musharraf. Ia memihak kepada Amerika Serikat dalam melawan pemerintahan Taliban di Afganistan. Perubahan kebijakan dan bantuannya kepada militer Amerika Serikat sangat kritis. Pengeboman cepat Amerika Serikat menggulingkan rezim Taliban. Musharraf telah bekerja erat dengan Presiden George W. Bush dalam "Perang Melawan Teror" dan menyebabkan meluasnya rasa tidak puas di kalangan rakyat Pakistan karena berbagai alasan.

Tak lama setelah peristiwa 11 September 2001, Musharraf menyampaikan pidato yang sangat penting di televisi Pakistan. Pervez Musharraf menjanjikan dukungan pribadinya mengatasnamakan sebagai Presiden Pakistan terhadap Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme. Dukungannya terhadap Amerika Serikat sangat penting dalam mengalahkan Taliban di Afganistan. Hal ini dilakukan setelah keputusannya yang cepat dan strategis untuk menghentikan dukungan Pakistan terhadap Taliban. Pakistan memotong garis-garis pemasokan minyak dan logistik Taliban.

Musharraf yang fasih berbahasa Inggris dan telah memberikan banyak wawancara dan pidato di berbagai saluran televisi Amerika Serikat dan Eropa serta media-media lain. Dukungannya terhadap perang melawan teror yang dipimpin Amerika Serikat telah

menyebabkannya tidak disukai oleh sejumlah partai fundamentalis sayap kanan Pakistan. Citra Amerika Serikat di Pakistan telah banyak cedera setelah invasi ke Irak pada 2003 tanpa resolusi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa).

Musharraf dengan tegas menolak untuk mengirimkan pasukan Pakistan ke Irak tanpa resolusi PBB. Ia telah membuktikan sedikit keheranan dan dipuji secara luas untuk kampanye anti-korupsi dan mendukung Amerika Serikat dalam Perang Melawan Terorisme. Musharraf dianggap sebagai pemimpin yang moderat oleh negara-negara Barat. Banyak yang percaya bahwa Musharraf memang tulus dalam keinginannya untuk menjembatani dunia Islam dengan Barat. Lebih jauh, ia menciptakan sikap Moderat dan aktif mempromosikan sikap seperti itu.

Ikatan emosional Musharraf dengan Amerika Serikat dapat dianggap penting karena sekurang-kurangnya dua orang anggota dekat keluarganya tinggal di sana, yaitu saudara laki-lakinya yang seorang dokter tinggal dekat Chicago, Illinois dan anak laki-lakinya tinggal di Boston, Massachusetts. Anak laki-lakinya mendapatkan gelar B.Sc. dan M.Sc. dalam Teknik Listrik dari MIT dan membuka usaha berteknologi canggih (*high-tech*) yang memperoleh dana ventura di Boston. Anaknya perempuannya adalah lulusan Sekolah Tinggi Seni Nasional di Lahore dan menjadi seorang arsitek. Kakak laki-lakinya yang seorang Sarjana Rhodes di Oxford adalah seorang Komisaris Kepolisian di Pemerintah Pakistan sebelum pensiun dari Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (IFAD) di Roma, Italia.¹⁰

Sebuah partai yang pro-Musharraf, yaitu PML-Q memenangi suara pluralitas di dalam pemilu Oktober 2002 dan membentuk koalisi mayoritas dengan pihak independen dan sekutu-sekutu seperti Muttahida Qami Movement (MQM). Namun demikian, partai-partai oposisi

¹⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/Pervez_Musharraf

berhasil memacetkan Dewan Nasional dengan cara menolak keabsahan kekuasaan Musharraf. Pada Desember 2003, sebagai bagian dari kompromi dengan kelompok oposisi Islamis utama, Muttahida Majlis-e-Amal (MMA), Jenderal Musharraf mengatakan bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Staff Angkatan Darat Pakistan pada 1 Januari 2005.

Sebagai imbalan, MMA setuju untuk mendukung amandemen konstitusi yang akan secara mundur melegalisasi kudeta Musharraf dan memulihkan sebagian dari checks and balances kepada sistem pemerintahan Pakistan. Namun pada akhir 2004, para anggota parlemen pro-Musharraf menyetujui sebuah rancangan undang-undang yang mengizinkan Musharraf mempertahankan kedua jabatan, dan Musharraf pun setuju. Dengan dukungan partai itu, para anggota parlemen pro-Musharraf dapat menguasai dua-pertiga super-mayoritas yang dibutuhkan untuk meloloskan Amandemen ke-17 yang secara retroaktif melegalisasikan kudeta Musharraf tahun 1999 dan banyak dekrit yang dikeluarkan sesudah itu. Dalam sebuah mosi percaya pada 1 Januari 2004, Musharraf memenangi 658 dari 1.170 suara di Dewan Pemilih Pakistan ia dianggap terpilih menjadi Presiden hingga Oktober 2007.¹¹ Pada saat Pervez Musharraf menjabat sebagai presiden Pakistan, ia memberikan amnesti kepada Benazir Bhutto atas tuduhan korupsi, mengintimidasi pengadilan, serta melanggar sistem hukum.

Presiden Musharraf menandatangani pembatalan tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada Benazir Bhutto dan mempersilahkan Benazir Bhutto untuk kembali ke Pakistan. Benazir Bhutto lalu mendaftarkan diri di pemilihan umum parlemen. Tidak hanya Benazir Bhutto saja yang kembali ke Pakistan akan tetapi mantan Perdana Menteri lainnya yaitu Nawaz Sharif

¹¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Pervez_Musharraf

kembali dari pengasingan dan meramaikan pemilihan umum parlemen tahun 2008. Pervez Musharraf pernah melakukan keadaan darurat militer pada tanggal 3 November 2008. Pada tanggal 27 Desember 2007 Benazir Bhutto meninggal pada saat melakukan kampanye terbuka di Rawalpindi dan hal itu menyebabkan pengunduran pemilihan umum parlemen dari tanggal 6 Januari 2008 menjadi 18 Februari 2008.

C. Pokok Permasalahan

“Bagaimana keterlibatan militer terhadap proses demokratisasi Pakistan pada saat pemerintahan Pervez Musharraf?”

D. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti memperhatikan ataupun melihat. Menurut Mochtar Mas'ood yang juga merupakan salah satu tokoh Hubungan Internasional di Indonesia dalam bukunya menerangkan bahwa teori adalah bentuk pernyataan yang dipakai untuk menjawab pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis dimana teori berupa sebuah kesimpulan generalisasi yang di dalamnya terdapat konsep-konsep secara logis dimana teori berupa sebuah kumpulan generalisasi yang di dalamnya sehingga dapat menjelaskan suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan suatu fenomena tersebut secara ilmiah.¹² Untuk dapat menjawab dan mendeskripsikan fenomena yang menggambarkan keterlibatan militer dalam demokrasi Pakistan pada masa Pervez Musharraf (1999-2008) adalah menggunakan teori Pretorian dan Demokrasi Polyarchy.

¹² Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 186.

Pretorian

Teori Pretorianisme-nya Nordlinger yang mengacu pada situasi dimana tentara tampil sebagai aktor politik yang sangat dominan yang secara langsung menggunakan kekuasaan mereka. Militer Pretorian dapat diklasifikasikan sebagai *moderator, pengawal dan penguasa*.¹³ Jenis pertama, *Pretorian moderator* menggunakan hak veto atas keputusan pemerintah dan politik, tanpa menguasai pemerintahan itu sendiri. Tentara pretorian moderator mencoba menghindari diri untuk menguasai pemerintahan, mereka juga tidak begitu menonjol dibandingkan jenis pretorian lain. Mereka mencoba mempertahankan status Quo, menjaga keseimbangan diantara kelompok yang bersaing, melaksanakan Undang-Undang Dasar dalam politik dan kelembagaan, melarang setiap percobaan dalam mengalihkan hasil ekonomi dan menjaga stabilitas politik dan pemerintahan.

Pretorian kedua adalah pretorian pengawal setelah mereka menggulingkan pemerintahan sipil, pada umumnya mereka sendiri akan memegang tampuk pemerintahan untuk periode dua tahun atau lebih. Pengawal pretorian berbuat demikian sebagian disebabkan kepercayaan bahwa tidak ada lagi pilihan lain karena tidak adanya satu golongan elit yang mampu mempertahankan status Quo politik dan ekonomi. Pengawal Pretorian memberikan perhatian besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan menangkali inflansi yang membumbung, anggaran belanja yang berlebihan dan neraca pembayaran yang defisit yang terjadi di bawah pemerintahan sipil.

Jenis *Pretorian ketiga* adalah Pretorian penguasa, mereka tidak hanya menguasai pemerintahan tetapi juga mendominasi rezim tersebut. Tujuan dan ekonomi penguasa Pretorian

¹³ Eric A. Nordlinger, *Militer dalam Politik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 5-7.

adalah sangat tinggi, hingga kadangkala mereka menganggap dirinya sebagai golongan modernis yang radikal atau revolusioner.

Dalam kasusnya Pervez Musharraf sendiri termasuk pada golongan Pretorian ketiga yaitu Pretorian penguasa, dimana pada saat Pervez Musharraf menguasai pemerintahan, Pervez Musharraf merangkap jabatan di Kepala Staff Angkatan Bersenjata Pakistan, dimana setelah militer berhasil menggulingkan pemerintahan sipil yang sedang berkuasa kemudian menguasai pemerintahan tersebut Pervez Musharraf mendominasi kekuasaan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada masa Pervez Musharraf resmi melancarkan kudeta yang keempat atas pemerintahan Nawaz Sharif pada tanggal 12 Oktober 1999. Sebagai seorang Pretorianis, Musharraf memiliki karakteristik yang keras, berambisi dan berani mengambil resiko dalam tindakannya.¹⁴

Pervez Musharraf mendominasi jalannya pemilihan umum 2002 dikarenakan tidak mendapat persaingan yang berarti dari rival politiknya yaitu Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif. Mereka pada saat itu dalam pengasingan diri ke Dubai dan Arab Saudi. Benazir Bhutto didakwa melakukan korupsi pada masa pemerintahan Farooq Leghari. Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam perpolitikan Pakistan yang memiliki basis kekuatan di partai mereka yaitu Partai Rakyat Pakistan dan Partai Muslim Liga N. Pervez Musharraf sempat memberlakukan keadaan darurat di Pakistan pada tanggal 3 November sampai 15 Desember 2007 dikarenakan gerakan ekstrimisme dan kerusuhan yang semakin meningkat menjelang pemilihan umum parlemen pada tanggal 8 Januari 2008.

¹⁴ Times, 25 Desember 1999

Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan oleh rakyat. Ada banyak sekali teori yang membahas tentang demokrasi yang dikemukakan para ahli, demokrasi sendiri berasal dari gabungan dua kata bahasa Yunani yaitu “demos” (rakyat) dan “kratos” (pemerintah).¹⁵ Ditinjau dari segi etimologi, demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti memerintah. Jadi *democratie* adalah pemerintahan oleh rakyat. Sedangkan landasan demokrasi sendiri adalah kebebasan, dimana salah satu prinsip kebebasan itu adalah bahwa setiap orang bergantian wajib memerintah dan diperintah, dan memang keadilan demokratis merupakan penerapan persamaan jumlah bukan proporsi, dari situlah dapat disimpulkan bahwa mayoritas harus memiliki kekuasaan dan apapun yang disetujui oleh mayoritas harus menjadi tujuan dan adil.¹⁶

Robert A. Dahl mengemukakan ciri demokrasi adalah adanya sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Robert Dahl mengajukan konsep “demokrasi polyarchy”(Ramlan Surbakti 1996:10) Konsep demokrasi polyarchy, melibatkan dua dimensi yaitu perlombaan dan peran serta. Ada tiga prinsip utama dalam demokrasi yaitu: Kompetisi, Partisipasi, Kebebasan Politik dan Sipil .¹⁷ Menurut Robert A. Dahl Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁵ George Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi* Prospek dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, cet I. hal.2

¹⁶ Diane Revitch & Abigail Thernstrom, *Demokrasi Klasik dan Modern*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2005. Hal. 13.

¹⁷

http://72.14.235.132/search?q=cache:eaFLsqIrKWYJ:www.uny.ac.id/akademik/sharefile/files/222.124.21.205_17032007134410_gragon.doc+ramlan+surbakti+konsep+demokrasi+polyarchy&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id

1. Menyelenggarakan pemilihan yang terbuka dan bebas
2. Mengembangkan pola kehidupan politik yang kompetitif dan
3. Memberikan perlindungan terhadap kebebasan masyarakat.¹⁸

Bila dilihat dari beberapa faktor diatas maka Pakistan sudah bisa dikatakan demokratis pada saat pemilihan parlemen pada bulan Januari 2008 diikuti dengan adanya partai oposisi yang sama kuat dengan partai penguasa untuk bersaing yaitu dengan kepulauan dua Mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif pulang dari pengasingan yang meramaikan bursa pemilihan. Adanya suatu bentuk kompetisi dan partisipasi yang terbuka dan bebas serta kompetitif dimana para kandidat berusaha menarik simpati rakyat Pakistan.

Untuk mempermudah penelitian ini perlu diketahui beberapa konsep penting yaitu konsep transisi rezim. *Konsep Transisi rezim* , merupakan suatu proses transisi politik dimana terjadi peralihan kekuasaan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yang melibatkan berbagai kelompok yang berjuang untuk memperoleh kekuasaan, untuk mendukung dan menentangnya. Pengertian sederhana dari transisi adalah selang waktu antara satu rezim politik dan rezim yang lain. Samuel P. Huntington mengelompokkan transisi dari rezim otoriter ke rezim demokratis ke dalam empat tipe besar, yaitu:

1. *Tranformasi* atau *Reforma*, terjadi ketika elit yang berkuasa dalam rezim otoriter mempelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sebuah sistem demokratis.
2. *Replacement* atau *Ruptura*, terjadi saat kelompok oposisi mempelopori proses perwujudan demokrasi dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan.

¹⁸ Robert A. Dahl, *Polyarchy : Participation and Opposition*, New Heaven, Yale University Press, 1971, hal. 2

3. *Transplacement* atau *Ruptforma*, terjadi apabila demokratisasi merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintahan dan kelompok oposisi.
4. *Intervensi* yakni proses demokratisasi yang dipaksakan oleh kekuatan asing dengan menumbangkan rezim otoriter yang sedang berkuasa.¹⁹

Dari empat proses tersebut, transisi demokrasi yang terjadi di Pakistan termasuk dalam kategori Transformasi atau Reforma, yaitu proses demokrasi terjadi ketika elit penguasa memelopori proses perwujudan demokrasi, di mana para ‘pelaku’ di dalam rezim lama masih diberi kesempatan turut ‘bermain’ secara signifikan.²⁰ Perwujudan ini ditandai dengan kembalinya dua tokoh oposisi pemilihan umum Pakistan yaitu Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif dalam pemilihan umum Parlemen Januari 2008.

Contoh penerapan dari kekuasaan yang dipegang dari kalangan militer untuk menciptakan demokrasi yang buruk ada pada saat pemerintahan George W. Bush di negara Amerika Serikat pada saat melakukan invansi ke Irak. Banyak sekali warga Amerika Serikat yang menolak tindakan dari Presiden George W. Bush dalam melakukan invansi ke Irak. Tanpa tujuan yang tidak jelas, Amerika Serikat menganggap bahwa negara Irak mengembangkan senjata pemusnah massal yaitu nuklir, setelah senjata pemusnah massal tidak terbukti Amerika Serikat mencari-cari alasan bahwa Presiden Saddam Hussein terlibat dalam pembunuhan perang yang mengakibatkan Presiden Saddam Hussein tewas di tiang gantungan. Banyak sekali pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang terjadi baik di Irak maupun di penjara Guantanamo, banyak sekali foto-foto yang mengambil gambar-gambar kekerasan serta

¹⁹ Samuel P. Huntington, “Gelombang Demokratisasi Ketiga”, Jakarta, Grafiti Press, 2000. Hal. 147

²⁰ Center for Good Corporate Governance, Gadjah Mada University Yogyakarta, Patnership of Governance, Jakarta *Implikasi Keberadaan Lembaga Sampiran Negara (komisi-komisi) bagi ketatalembagaan yang demokratis di Indonesia*. Jakarta, 2008

penyiksaan tahanan yang dilakukan secara tidak manusiawi. Itu salah satu contoh buruk dari Demokrasi yang dipegang oleh kalangan Militer.

Amerika Serikat yang dianggap sebagai pusat perkembangan penegakkan demokrasi di dunia. Demokrasi berjalan baik di Amerika Serikat pada saat Franklin Delano Rosevelt Presiden Amerika Serikat dari kalangan militer yang menerapkan demokrasi di depan kongres pada tahun 1941 mengatakan the *Four Freedoms* yang berisi tentang *Pertama* adalah kebebasan berbicara dan berpendapat di manapun di dunia. *Kedua* ialah kebebasan setiap orang untuk beribadat kepada Allah dengan caranya sendiri dimanapun di dunia. *Ketiga* bebas dari kekurangan, yang kalau diterjemahkan dalam istilah yang lebih umum, berarti berkaitan dengan pengertian ekonomi yang menjamin bahwa setiap Negara mempunyai kehidupan masa damai yang sehat bagi rakyatnya dimana pun didunia. *Keempat* bebas dari rasa takut yang kalau diterjemahkan dalam pengertian umum berarti pengurangan persenjataan diseluruh dunia sampai ke suatu tingkat tertentu dan dengan cara yang seksama sehingga tidak ada suatu bangsa yang sanggup melakukan tindakan agresif fisik terhadap Negara tetangganya dimanapun di dunia.²¹

Sedangkan kebaikan dari Pemerintahan Pervez Musharraf sendiri adalah dengan menumpas jaringan terorisme yang disinyalir berada di daerah Pakistan dengan tidak melupakan adanya campur tangan dari pihak Amerika Serikat sendiri. Keburukan dari Pemerintahan Musharraf adalah banyaknya konflik-konflik yang berkembang di daerah Pakistan, kekuasaan yang terpusat kepada Presiden saja dan kurang terbuka dalam memimpin Pakistan.

²¹Diane Revitch & Abigail Thernstrom, *Demokrasi Klasik dan Modern*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2005. Hal.206-209.

E. Hipotesa

Pemerintahan Demokrasi dalam pengaruh Presiden berlatar belakang militer adalah

1. Adanya kebebasan akan tetapi dibatasi
2. Adanya Partai akan tetapi terbatas
3. Adanya Pemilu akan tetapi tidak terjadi transformasi rezim

F. Tujuan Penulisan

Dalam konteks akademik, tentunya tulisan ini dimaksudkan untuk menambah khazanah wawasan kita tentang militer dan demokrasi dari perspektif yang lebih variatif. Dengan kata lain, diharapkan dari penelitian ini bisa ditemukan sebuah peta pemikiran konkrit ketika kita membahas Militer dan Demokrasi secara proporsional, diharapkan pula muncul perspektif baru dalam melihat fenomena politik antara militer dan demokrasi.

Disamping itu, karya tulis ilmiah ini juga akan dijadikan tolak ukur sejauh mana hasil studi dan pemahaman penulis dalam menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebelum menyandang gelar kesajanaan. Walaupun ukuran keberhasilan dalam sebuah studi bukan hanya ditentukan dari sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Memenuhi Persyaratan untuk menempuh jenjang Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui Proses Demokrasi di Pakistan dengan kepemimpinan berlatar belakang militer pada masa pemerintahan Pervez Musharraf.

3. Untuk mengetahui seberapa besar dampak dari kepemimpinan berlatar belakang militer untuk memimpin sebuah Negara demokrasi terhadap rakyat Pakistan dan pengaruh terhadap hubungan internasional pada umumnya.
4. Untuk mengetahui usaha-usaha dan sikap yang dilakukan pemerintahan Pervez Musharraf dalam kepemimpinannya melakukan upaya untuk melaksanakan demokrasi, baik situasi politik dalam negeri maupun menyangkut kebijakan politik luar negerinya.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan Penelitian yang penulis gunakan dalam menganalisa masalah diatas yaitu dengan batasan waktu 12 Oktober 1999 sebagai momen dimulainya kudeta terhadap pemerintahan Nawaz Sharif sampai 18 Agustus 2008 saat Presiden Musharraf mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Pakistan

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari sumber-sumber yang dapat diamati dan menganalisa permasalahan dengan data tersebut. Sedangkan pengumpulan data untuk teknik penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan atau library research dimana data berasal dari literatur, jurnal, laporan penelitian, internet serta liputan yang ditampilkan dari majalah, Koran.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing Bab akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Menerangkan Pelembagaan Demokrasi di Pakistan

Bab III Menerangkan Pelembagaan Militer di Pakistan

Bab IV Menerangkan bagaimana Penerapan Demokrasi Pemerintahan Presiden Pervez Musharraf

Bab V Berupa Kesimpulan dari pembahasan skripsi.